

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK
MASYARAKAT (POKMAS) DI KELURAHAN TENDA
KECAMATAN HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO**

OLEH:

SITI HADIDJAH ABDULLAH
S.21.18.034

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) DI KELURAHAN TENDA KECAMATAN
HULANTHALAGI KOTA GORONTALO

Oleh :

SITI HADIJAH ABDULLAH

NIM :S2118034

SKRIPSI

Telah disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo 08 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

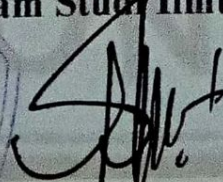


Marten Nusi, S.IP.,M.AP



Deliana Vita Sari Djakaria, S.IP.,M.IP

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abd Razak, S.IP,M.AP

NIDN:0924076701



HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULANTHALAGI KOTA GORONTALO

Oleh :

SITI HADIJAH ABDULLAH

S2118034

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 08 Juni 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Komisi Penguji :

1. Marten Nusi, S.IP.,M.AP

.....

2. Delianan Vita Sari Djakaria, S.IP.,M.IP

.....

3. Dr. Arman, S.Sos.,M.Si

.....

4. Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP

.....

5. Sandi Prahara, S.T.,M.Si

.....

Mengetahui :

**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN:0913078602

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Darmawaty Abd Razak, S.IP, M.AP
NIDN:0924076701

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI HADIDJAH ABDULLAH
NIM : S21.18.034
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) DI KELURAHAN TENDA KECAMATAN
HULANTHALANGI KOTA GORONTALO

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan benar-benar pekerjaan saya sendiri kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan studi di Perguruan Tinggi lain kecuali pada bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan.

Gorontalo, Juni 2022

Yang menyatakan,



SITI HADIDIJAH ABDULLAH

NIM S.21.18.034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- "Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan untuk kesejahteraan orang banyak."
- "Jika bersungguh-sungguh, maka kita bisa memperoleh kesuksesan".

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud kasih sayang, bakti dan terima kasihku kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, do'a yang tulus pengorbanan dan dukungan, serta saudara yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku terima kasih atas semuanya.

Dan teman teman fakultas ilmu sosial dan ilmu politik program studi ilmu pemerintahan

ABSTRACT

SITI HADIDJAH ABDULLAH. S2118034. THE IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY GROUP PROGRAM (POKMAS) AT THE TENDA URBAN VILLAGE, HULONTHALANGI SUBDISTRICT, GORONTALO CITY

This study aims to determine and analyze the implementation of the community group programs at the Tenda Urban Village, Hulonthalangi Subdistrict, Gorontalo City. This study employs a qualitative method. The data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique applies interactive data analysis. The results of the study indicate that the implementation of the Community Group Program at the Tenda Urban Village, Hulonthalangi Subdistrict of Gorontalo City, in general, can be said to have been going well. It illustrates the policy implementation process with some variables. The indicators cover good focus, socialization, budget, and implementation actors run in the implementation of the Community Group Program. There are several problems in the field hindering its implementation following the objectives, namely understanding related to community programs and the lack of community involvement. As a suggestion, the Tenda Urban Village government, in the context of providing socialization, must prioritize the principle of broad information disclosure to the people at the Tenda Urban Village. Communication media through community units must be intensified as much as possible. For instance, community consultations at the neighborhood level, community meetings at the Urban Village office, and other efforts can explain the objectives of the program.

Keywords: policy implementation, Community Group Program

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep kebijakan Publik	8
2.2 Pengertian Impelementasi Kebijakan	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Obyek Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Fokus Peneliti.....	42
3.4 Lokasi Penelitian.....	42
3.5 Informan Penelitian.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	4
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 gambar umum penelitian.....	34
4.2 hasil penelitian	34
4.2.1. faktor sosialisasi program	35

4.2.2 faktor anggaran.	37
4.2.3 aktor pelaksana program	39
4.3 pembahasan.....	41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan	44
5.2 saran	44

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahillobbil'aalamin.. Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo”. Usulan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan – bantuan dalam bentuk bimbingan, keterangan serta dorongan moril maupun materiil, sehingga Usulan Penelitian ini dapat peneliti selesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya, kepada :

1. Ibu Dra.Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Ibu Darmawaty Abd Razak, S.IP.,M.AP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Marten Nusi, S.IP. M.AP, selaku pembimbing I dan Ibu Deliana Vita Sari Djakaria, S.IP.M.AP selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan bimbingannya selama ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya dan iringan do'a mereka sehingga memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Usulan Penelitian dan Segenap keluarga besarku yang selalu mendukung setiap langkah peneliti.

Akhir kata semoga Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Peneliti menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu dengan rendah hati dan lapang dada peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kelanjutan pembuatan penelitian ini.

Gorontalo, Oktober 2021

Peneliti

Siti Hadijah Abdullah

dari kebijakan pembangunan yang terfokus pada beberapa bidang pembangunan, diantaranya adalah program infrastruktur, pemberdayaan, serta bidang lainnya.

Pokmas adalah bentuk kegiatan masyarakat yang melibatkan kelompok masyarakat yang ada dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan melaksanakan program-program dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diawali dengan perumusan program dengan pelibatan masyarakat setempat yang juga sebagai pelaksana program pada saat dilaksanakan nanti.

Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) secara Universal dilaksanakan hampir diseluruh daerah di Indonesia yang pada prinsipnya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik yang bermanfaat langsung pada kehidupan masyarakat yang pendanaannya dibiayai melalui APBD dan secara implementatif dianggarkan langsung oleh pemerintah Kelurahan melalui dana Kelurahan.

Keberadaan Program Kelompok masyarakat sejatinya sebagai implementasi langsung dari program pemerintah Daerah yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan. Olehnya komitmen pelaksanaan program tersebut harus betul-betul ditunjukkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo adalah satu diantara pemerintah Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo yang ikut serta membentuk dan melaksanakan program kelompok masyarakat. Sebagaimana petunjuk Walikota yang tertuang dalam Perwako No. 02 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dana Kelurahan di Kota Gorontalo yang pada intinya menitikberatkan pemanfaatan dana Kelurahan dengan baik dengan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan paska era reformasi telah beralih dari model pengambilan kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik ke model yang lebih bersifat kekuasaan di Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah Desentralisasi. Konsep Desentralisasi dalam pengambilan kebijakan telah digaungkan sejak 2004 merujuk pada penegasan akan fungsi Desentralisasi dalam pemerintahan Daerah.

Pembangunan di Indonesia selama ini telah diarahkan pada konsep pembangunan yang berkesinambungan. Konsep pembangunan berkesinambungan tersebut dimaksudkan untuk mempejelas arah pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap level pengambilan keputusan. Berkaitan dengan program pembangunan, satu konsep penting yang menjadi instrument pembangunan di Indonesia adalah adanya pembangunan manusia yang mengarah pada program-program pemberdayaan, kesejahteraan dan juga sarana dan prasarana sebagai ukuran dalam tercapainya pembangunan manusia tersebut.

Berbagai kebijakan pembangunan telah digulirkan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan Nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat pada beberapa program nyata di lapangan yang terlihat adanya keterlibatan masyarakat secara langsung didalamnya, seperti halnya program yang digagas melalui Program Kelompok Masyarakat (POKMAS). Pokmas adalah manifestasi

mempertimbangkan aspek kebutuhan dasar masyarakat pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

Sebagai bagian dari aktualisasi dana Kelurahan tersebut, maka kebijakan pembentukan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan dan pembangunan di Kelurahan dilaksanakan dengan berbagai bentuk kebijakan, mulai dari memanfaatkan struktur atau mitra pemerintah Kelurahan, serta membentuk kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan dan menggelorakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan secara langsung.

Pemerintah Kelurahan Tenda telah membentuk program Kelompok Masyarakat yang secara struktural berada langsung di bawah pembinaan dan tanggung jawab Lurah. Program Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana pedoman pelaksanaan yang ada memfokuskan pada program pembangunan infrastruktur berupa pembangunan drainase, perbaikan saluran air, perbaikan jalan lingkungan masyarakat, serta beberapa program perbaikan fasilitas umum masyarakat lainnya.

Konsep awal adanya program Kelompok Masyarakat tersebut dinilai oleh masyarakat sangatlah baik, karena dapat memberikan solusi pada permasalahan kehidupan, khususnya berkaitan dengan fasilitas masyarakat yang selama ini telah menjadi permasalahan klasik. Namun pada tahapan pelaksanaannya keberadaan program ini dinilai belum maksimal dan menjangkau seluruh lingkungan yang ada di masyarakat. Beberapa permasalahan secara konkrit yang ditemukan oleh penulis dalam pengamatan awal adalah diantaranya, pada tahapan perencanaan program, keikutsertaan masyarakat pada proses rancangan program prioritas dan klasifikasi

tempat yang menjadi focus pembangunan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat. Unsure keterwakilan hanya ditentukan oleh aparat Kelurahan dan tidak menjadi merepresentasikan ketsewakilan masyarakat. Selain sumber daya pelaksana teknis program pembangunan infrastruktur tidak melibatkan masyarakat setempat dimana program pembangunan itu dilaksanakan, namun sumber daya manusia yang dipakai adalah orang diluar dari wilayah setempat. Permaslaahan lainnya adalah anggaran yang dipakai pada pelaksanaan program juga masih minim dan tidak transparan, hal ini dapat dilihat pada program perbaikan saluran air masyarakat di RT 03, RW 05 dimana model perbaikan saluran air hanya terlihat asal-asalan dan tidak dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Persepsi masyarakat buruk dari masyarakat tentang program kelompok masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang muncul, juga sebagai akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat akan program tersebut.

Program-program pembangunan masyarakat yang seharusnya membawa manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat justru menjadi permasalahan pada saat pelaksanaan. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih jauh melalui penelitian dengan mengambil judul : **“Implementasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub bab sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah implementasi program kelompok masyarakat di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program kelompok masyarakat di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis

Diharapkan penelitian ini nantinya akan menjadi bagian pelengkap dari perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal peningkatan literasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dalam fokus kajian yang sama.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini penulis berharap akan menjadi referensi bagi pemerintah Daerah, khususnya pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan program kelompok masyarakat atau pelaksanaan kebijakan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Definisi kebijakan (*policy*) terkadang dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), programan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi pemerintahan atau lembaga yang memiliki tujuan untuk melaksanakan satu perubahan tertentu (Wahab, 2012)

United Nations (dalam Wahab, 2012) memberikan penjelasan tentang Kebijakan sebagai karakter dari aktor tertentu yang melaksanakan fungsi-fungsi administratif, baik dalam bentuk pejabat, kelompok tertentu atau lingkup pemerintahan yang terlibat dalam kegiatan tertentu.

Sejalan dengan pengertian diatas, penjelasan yang sama disampaikan oleh Islamy (2011), bahwa kebijakan publik adalah proses hasil rumusan keputusan yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan publik.

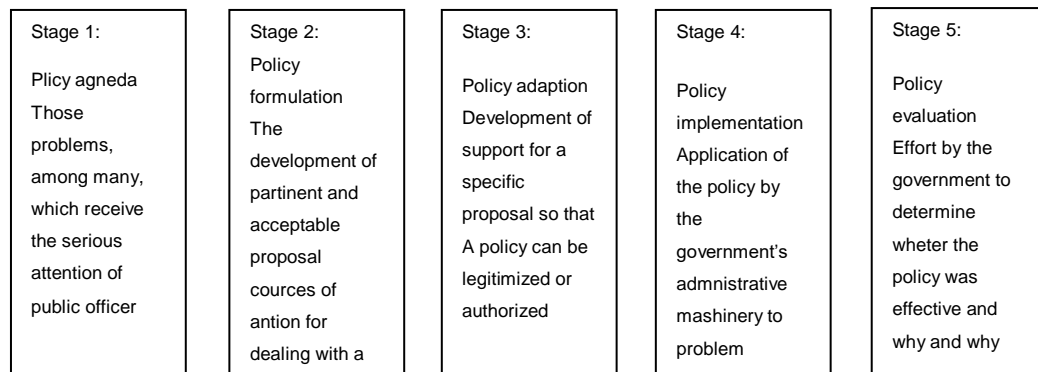
Pengertian tentang kebijakan public sangat luas konsep pendefinisianannya, serta memiliki Beragam persepsi didalamnya. Dalam konsteks umum kebijakan publik lebih dipahami sebagai proses yang mengarah pada satu pencapaian tujuan perubahan akan penyelesaian masalah publik dengan berbagai macam pendekatan dan model yang digunakan, sedangkan dalam pandangan khusus kebijakan lebih

dipahami pada penyelesaian konkrit akan masalah publik dengan mempertimbangkan siklus kebijakan publik.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya terjadi begitu saja, atau dengan kata lain tercipta dengan sendirinya. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang dan berliku yang dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses inilah merupakan bagian terpenting yang harus dilihat sebelum lahirnya kebijakan. Banyak para aktor yang berkepentingan, baik sebagai perumus kebijakan, implementor kebijakan, sampai aktor yang terlibat dalam melakukan evaluasi atau kebijakan kurang memperhatikan hal ini. Kurangnya perhatian para aktor terhadap proses kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara maksimal, atau justru terjadi kegagalan dan pada akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru.

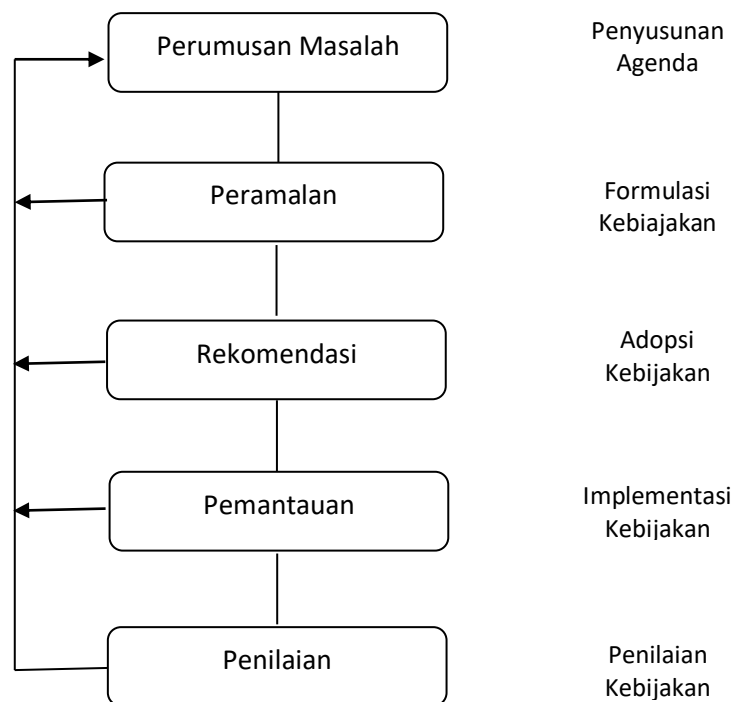
Menurut para ahli kebijakan, seperti halnya Jamis E. Anderson (dalam Nugrho:2012) bahwa rangkaian kebijakan yang ideal dapat dideskripsikan dibawah ini :



Sumber: Nugroho, 2006

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.

Tahapan dalam kebijakan publik akan memberikan hasil yang baik, ketika tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik pula. Menurut Dunn (dalam nugroho : 2012) dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, diantaranya: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahapan – tahapan yang saling berkaitan tersebut dapat dilihat seperti gambar 2.3 dibawah ini:



Sumber: Willaim N. Dunn, 1999:25

Gambar 2.2 *Prosedur Analisis Kebijakan dengan tipe-tipe Pembuatan Kebijakan*

Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Melihat masalah yang ada dan berkembang di masyarakat begitu kompleks dan beragam dan tentunya masalah – masalah tersebut akan saling berkompetisi sebelumnya untuk masuk pada agenda kebijakan. Kompetisi masalah – masalah yang ada, pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan untuk dipecahkan. Beberapa permasalahan yang ada ditentukan fokus pembahasan dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan tertentu dari para perumus kebijakan.

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan, kemudian masalah tersebut akan dibahas dan dicari solusi yang terbaik dari yang baik (Winarno, 2012, h. 36). Dalam tahap ini berbagai alternatif penyelesaian masalah akan saling berlomba untuk ditentukan, mana dari sekian alternatif penyelesaian masalah yang paling pantas dan terbaik untuk dijadikan solusi. Disinilah peran aktor akan sangat menentukan untuk bisa mengusulkan suatu pemecahan masalah yang terbaik yang dimiliki.

Setelah melewati beberapa tahapan, baik dari penyusunan agenda, sampai pada tahapan formulasi, dimana sekian banyak alternatif telah ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif atau keputusan pengadilan.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang sangat penting juga dalam proses kebijakan, yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tentu disadari bahwa suatu kebijakan, baik itu berupa program atau dalam bentuk peraturan lainnya yang telah dirumuskan secara matang tidak akan bernilai apa – apa atau hanya menjadi catatan semata, ketika tidak diimplementasikan.

Keputusan yang telah dijalankan pada tahap selanjutnya akan dilakukan penilaian atau dievaluasi. Tahapan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Secara umum dapat dipahami bahwa penjelasan tentang proses kebijakan publik sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan rangkaian yang sistematis dan tidak bisa terpisahkan antara tahapan – tahapan yang ada. Karena jika salah satu saja tidak dilaksanakan, maka kebijakan itu tidak akan lahir

atau tidak akan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga proses sistemik dari kebijakan publik tersebut dapat dikatakan merupakan aktifitas dengan bagaimana masalah itu dirumuskan, agenda kebijakan ditentukan, kebijakan dirumuskan, keputusan kebijakan diambil, kebijakan dilaksanakan dan kebijakan dievaluasi.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Berbagai macam tahapan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses kebijakan publik, memiliki sifat saling berketergantungan atau merupakan satu sistem yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan lainnya. Salah satu proses atau tahapan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan. Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah suatu program di rumuskan dalam bentuk keputusan – keputusan (*decision*) oleh para aktor.

Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting dalam proses kebijakan publik. Penting karena implementasi adalah ukuran utama tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan keputusan (Widodo, 2012).

“Implementasi kebijakan berarti usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (Islamy, 2011). Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta (secara individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) yang telah ditetapkan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Edward III Winarno (2012) yang mengatakan bahwa:

(implementasi kebijakan, seperti yang sudah disaksikan, adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak).

Bardach (parsons, 2011) mendefinisikan implementasi sebuah permainan tawar-menawar, persuasi dan manuver dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan hasil (*output*).

Sebagai suatu proses, implementasi kebijakan bukanlah suatu aktivitas tunggal (*single action*). Implementasi kebijakan, pada hakekatnya lebih sebagai sebuah proses yang akan terdiri atas serangkaian aktivitas fungsional penting. Jones (dalam Wiyoto, 2005, h. 34) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terdiri dari serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu:

a) Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan *translation of program into acceptable and feasible plans and directives* (Menerjemahkan kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan layak dilaksanakan).

b) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “*the establishment of resources, unit, and method for putting program into effect*” (Penetapan

atau melakukan pengaturab terhadap sumberdaya, satuan-satuan organisasi dan metode kerja untuk mendukung pelaksanaan program tindakan sehingga menimbulkan hasil tertentu).

c) Penerapan (*Application*)

Penerapan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan secara terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan).

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melihat pada konteks kelembagaan saja, namun lebih dari itu mengarahkan pada perspektif kejelasan akan tujuan yang dibuat dan dilaksanakan. Selain itu juga dapat disejelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk mencapi tujuan yang diharapkan.

2.2.1 Model-model Impementasi Kebijakan Publik

Istilah model merupakan pengistilahan yang dipakai oleh para analis untuk melakukan kajian atau analisis terhadap objek penelitian tertentu. Penggunaan teori atau model dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti atau analis memecahkan masalah – masalah yang sedang dikaji melalui pendekatan tertentu.

Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2012) menjelaskan bahwa model adalah “*a representation of something else, designed for a specific purpose*” (representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu). Jadi menurut definisi ini, yang dimaksud dengan model ialah suatu pengejawatan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu.

Selanjutnya dalam alur pemikiran yang hampir sama Thomas R. Dye (dalam Wahab, 2012:154) mengatakan bahwa “*a model is merely an abstraction or representation of political life*” (apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah sesuatu upaya menyederhanakan atau mengejewantahkan kenyataan politik).

Dalam kaitannya dengan kebijakan, Wahab (2012, h. 154) mengatakan bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisi yang dilakukan, maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional yang mampu menjelaskan hubungan kuualitas antarvariabel yang menjadi fokus analisis.

Kebijakan publik pada dasarnya dapat mencapai hasil yang baik, bila dimuali dari rencana yang tepat dan diimplementasikan dengan baik pula. Terkait dengan hal ini Nugroho (2012) menyatakan keberhasilan kebijakan publik yang direncanakan adalah 20 persen, sementara implementasinya 60 persen, sedangkan 20 persen sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Impelemtasi kebiajakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan, sehingga menjadi ancaman bagi konsistensi implementasi kebijakan.

Untuk memperkuat argumentasi tentang model implementasi kebijakan, berikut ini akan dipaparkan beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan analisa tentang masalah penelitian implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Model Van Metter dan Van Horn

Proses implementasi dalam rumusan Van Matter dan Van Horn pada dasarnya merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara searah dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

a) *Policy Standard and Objectives* (ukuran dan Tuntutan Kebijakan)

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

b) *Resources* (Sumber Daya)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu.

- c) *Interorganizational communication and enforcement activities* (Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana)

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesasalahan-kesalahan kecil jarang terjadi.

- d) *The characteristics of implementation of agencies* (Karakteristik Agen Pelaksana)

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil dari formulasi masyarakat yang merasakan permasalahan yang dihadapi dan kebijakan dari atas yang mana para pengambil keputusan tidak mengetahui dan merasakan permasalahan yang sedang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- e) *The economic, social and political enviroment* (Lingkungan ekonomi, sosial dan politik).

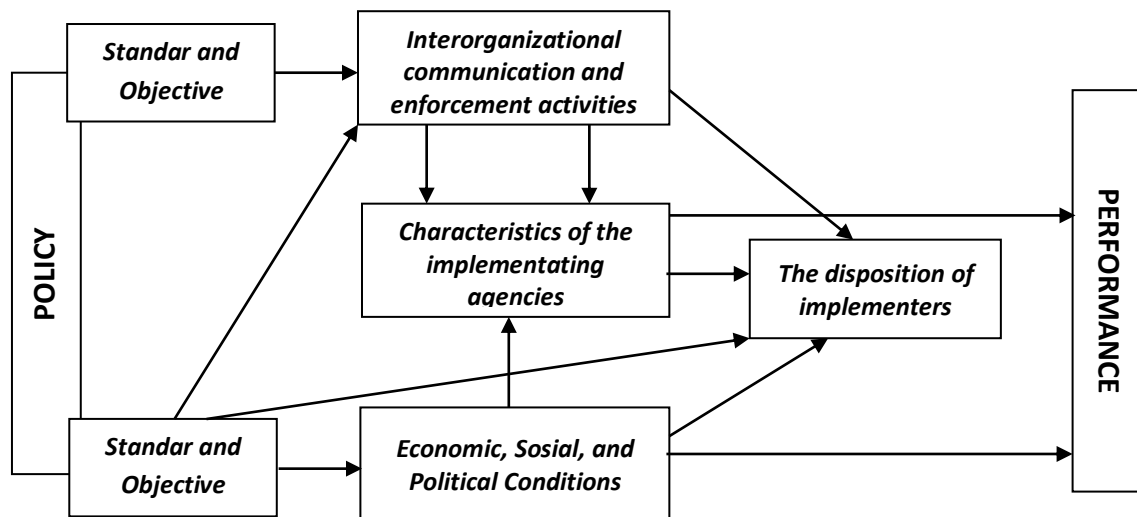
Hal ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal berpengaruh atau mendorong terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

- f) *The Disposition or respons of implementers* (Disposisi atau response dari para pelaksana)

Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi

kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

Model Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: D. Van Metter & C. Van Horn (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.3 A. Model of The Policy Implementation Process, D. Van Metter & C. Van Horn

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lain seperti yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi:

a. Kesukaran Teknis

Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukuran kinerja, serta pemahaman mengenai hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman Perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan jelas kelompok sasaran kebijakan, maka akan mudah dalam menggerakkan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki

Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar.

2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

Para pembuat kebijakan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui:

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alokasi sumberdaya

Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal

d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan anatar lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal dari badan-badan pelaksana kebijakan.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan

g. Akses formal pihak-pihak luar.

Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Dukungan publik.

Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

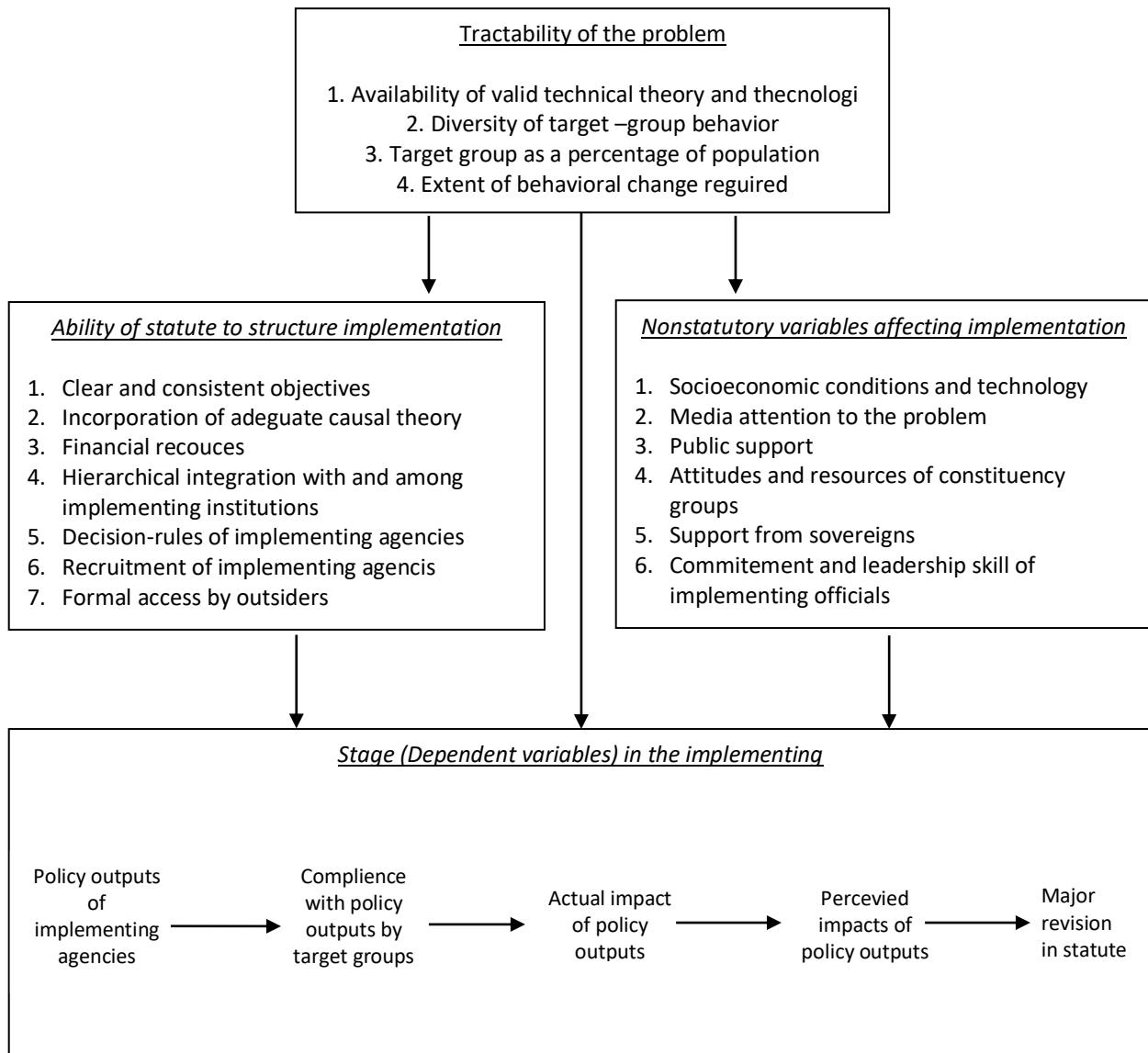
c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

d. Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Variabel-variabel yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2012, h. 685)

Gambar 2.4 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

3. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut Edward III dinamakan dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil, dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal (Winarno, 2012, h. 177). Edward berusaha menjawab dua pertanyaan penting tersebut dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah:

1) Komunikasi

Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. Proses pentransformasian informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentu saja, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas, maka tentu para pelaksana (*implementor*) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka lakukan.

Winarno (2012, h. 179) menjelaskan bahwa, faktor komunikasi lain dalam implementasi kebijakan adalah:

“Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Selain itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan”.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi, yaitu adanya mispersepsi atau kesalahan pemahaman yang dapat memicu pertentangan diantara pelaksana program, sehingga dampaknya kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.
- b) *Kejelasan*; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- c) *Konsistensi*; Upaya melaksanakan kebijakan dengan penuh konsisten dan jelas akan memunculkan keberlangsungan dari kebijakan yang efektif. Konsistensi tersebut menyangkut tentang perintah-perintah pelaksanaan. Sekalipun dinilai bahwa perintah-perintah tersebut mengandung kejelasan, namun bertentangan, maka perintah tersebut justru akan membingungkan dan akan mempersulit para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya

“Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka sumber daya yang dimaksud meliputi:”

- a) *Staf*, Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Olehnya staf yang mampu secara kompetensi dan tercukupi secara kuantitas, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.
- b) *Informasi*, Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. *Kedua*, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

- c) *Wewenang*, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementor dimata publik terjaga, sehingga para implementor dapat melaksanakan kebijakan secara baik.
- d) *Fasilitas*, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal, serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Variabel disposisi menurut Edward III, yaitu:

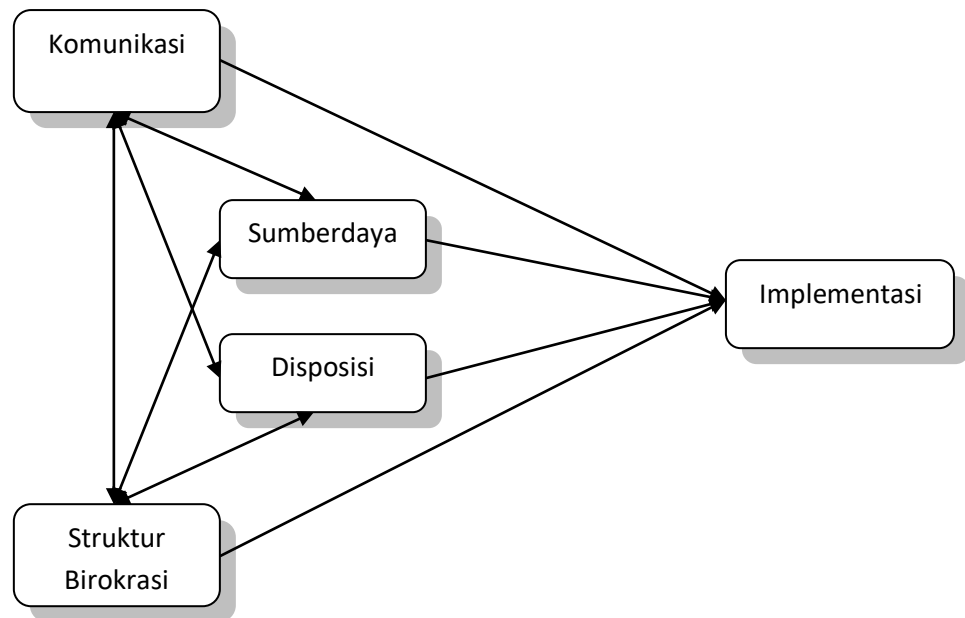
- a) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
- b) *Insentif*, Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012, h. 201) salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat merubah personil dan birokrasi pemerintahan agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Manipulasi insentif dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan tingkat tinggi untuk dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Agustino, 2008, h. 153). Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) bahwa untuk mengangkat kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *fragmentation* (fragmentasi), fragmentasi dimaksudkan

sebagai upaya penyebaran tanggungjawab dibidang kebijakan antara beberapa unit organisasi.

Model Implementasi menurut Edrward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: George Edward III (dalam Agustino, 2008, h. 150)

Gambar 2.5 Model *Direct and Indirect Impact on Implementation* (Geoge Edward III)

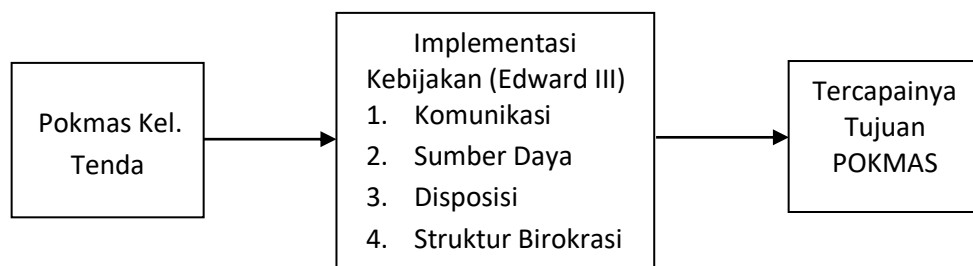
2.3 Kerangka Pikir

Kebijakan pembangunan pada level pemerintahan terendah, yaitu Desa, maupun Kelurahan adalah proses akhir dari aktualisasi kebijakan publik Pusat dan Daerah yang didukung dengan tahapan perencanaan yang matang, serta dukungan sarana lainnya. Pada level ini kebijakan diterjemahkan melalui model rumusan dan implementasi yang berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah menjadi hal mutlak untuk

dilakukan, mengingat masyarakatlah yang menerima dampak dari satu rumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Konsep pembangunan yang didanai melalui APBD ditingkat Kabupaten/Kota dengan pendekatan button up telah membawa dampak yang cukup baik pada realisasi kebijakan yang terlihat pada peningkatan kehidupan masyarakat, baik pada aspek ekonomi, maupun kebutuhan akan infrastruktur dasar.

Program kelompok masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthlangi Kota Gorontalo adalah program yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program rilnya pada bidang infrastruktur. Pada tataran implemetasinya program ini terlihat bermasalah yang terlihat pada aspek pemahaman masyarakat akan program tersebut, kurangnya anggaran dan sumber daya pelaksana yang dapat mendukung pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2012) telah menjelaskan akan penting instrument pendukung dalam suksesnya satu kebijakan dilaksanakan. Instrument-inetrumen tersebut diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Alur berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui baga dibawah ini :



BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta penjelasan dari kerangka pikir, maka yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Impelementasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthlangi Kota Gorontalo.

3.2 Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian yang bersifat naratif menekankan pada aspek penalaran mendalam dengan tujuan agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersur, maka jenis penelitian dalam usulan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif/gambaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy Moleong (2014: 4), jenis penelitian kualitatif adalah sebagai model penelitian yang dapat menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian, serta perilaku dari objek yang diamati selama penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Selain menekankan pada hasil yang bersifat holistik, penelitian kualitatif juga menekankan pada kejelasan fokus penelitian yang menjadi titik penting untuk dijadikan bahan kajian yang relevan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Fokus akan menentukan batasan-batasan dari peneliti tentang apa yang akan dikaji

dan di teliti lebih jauh, serta memungkinkan penulis untuk tetap terarah pada objek kajian pada saat pengumpulan data dan analisis data.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Impelementasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Tenda yang dikaji pada beberapa indikator, yaitu :

- a. Sosialisasi Program
- b. Anggaran
- c. Aktor pelaksana kebijakan

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tentang dimana penulis melakukan penelitian atau dimana penelitian itu dilakukan. Olehnya yang menjadi lokus atau lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangai, Kota Gorontalo.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian tidak berdasarkan pada keinginan semata dari penulis, namun mempertimbangkan faktor keterkaitan dengan orang yang dianggap mengetahui pokok kajian yang sedang dilakukan, dengan Teknik purposive sampling, sehingga memudahkan perolehan informasi secara jelas dan dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan informasi pada beberapa sumber berikutnya. Olehnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Lurah Kelurahan Tenda
- 2) Sekretaris Lurah
- 3) Kasie pembangunan
- 4) Aparat Desa
- 5) Masyarakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya : wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai mana dibawah ini :

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menjaring data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. wawancara di lakukan secara terbuka dengan tujuan agar peneliti dapat dengan leluasa mengembangkan pertanyaan yang muncul.

3.6.2 Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indra ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

3.6.3 Dokomentasi

Pengumpulan data dengan cara mengkaji data sekunder, kemudian mengumpulkannya, mencatat ataupun mempelajari dokumen-dokumen / arsip-arsip yang ada, yang terkait dengan penelitian. sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi atas dasar referensi buku maupun naskah yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilaksanakan pada tahapan dimana peneliti telah melakukan pengumpulan data lapangan yang kemudian melanjutkannya dengan analisis terhadap data-data tersebut secara deskriptif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005: 91–101) proses analisa terdiri dari :

1) Data *Reduction* (Reduksi data)

Tahapan ini ada awal analisa terhadap data temuan dengan cara melakukan pemilahan atau mengklasifikasikan temuan lapangan dengan tema atau materi penelitian. Proses ini menuntut peneliti untuk menganalisis data-data primer dan sekunder secara seksama dengan mengedepankan relevansi data temuan.

2) Data *Display* (Penyajian data)

Proses penyajian data dilakukan adalah upaya untuk memberikan penjelasan secara naratif atau uraian terhadap hasil analisis data yang dilakukan melalui reduksi data.

3) Verifikasi (Menarik kesimpulan).

Tshapan ini adalah proses akhir dari analisis data untuk memberikan penjelasan konkrit dalam bentuk kesimpulan akan temuan penelitian yang kemudian diuraikan secara konprehensif dan sistematis sebagai bentuk pemahaman peneliti akan hasil yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara historis terbentuknya wilayah Kelurahan Tenda tidak lepas dari sebutan Pabean yang sejak dulu menjadi istilah masyarakat setempat sebagai kampung saat itu. Seiring berjalannya waktu akhirnya atas prakarsa para tokoh-tokoh masyarakat adat, wanita dan pemuda serta pemerintah setempat, menyepakati bahwa nama kelurahan tersebut menjadi sebuah atau Tenda yang artinya sama, yaitu tempat berteduh. Pada tahun 1990 perubahan nama kampung menjadi Kelurahan Tenda ditetapkan oleh pemerintah tingkat dua dengan ditunjuknya kepala Kelurahan pertama, yaitu bapak Kolomdan.

Secara topografis Kelurahan Tenda terletak pada ketinggian 900 meter diatas permukaan laut. Dengan jumlah penduduk 6004 jiwa, laki-laki berjumlah 2992 jiwa dan perempuan 3012 jiwa. Kelurahan Tenda masuk dalam wilayah kecamatan Hulonthalangi setelah dimekarkan yang sebelumnya berada dalam wilayah Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

4.2 Hasil Penelitian

Konsep kebijakan publik dalam berbagai literature telah memberikan penjelasan secara gambalang akan dimensi-dimensi sebagai proses terwujudnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini berangkat dari beberapa indikator fokus penelitian yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian berupa wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1. Faktor Sosialisasi Program

Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Tenda adalah kebijakan pemerintah daerah Kota Gorontalo yang di hulirkan ke semua Kelurahan di wilayah Kota Gorontalo untuk dilaksanakan dengan biaya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Gorontalo, maka menjadi tanggung jawab dari semua yang berkepentingan dipemerintahan daerah dan Kelurahan untuk mesosialisasikan program tersebut pada masyarakat. Salah satu hal yang diteliti terhadap pelaksanaan program kelompok masyarakat di kelurahan Tenda adalah tentang sosialisasi program kepada masyarakat. Terdapat beberapa hasil wawancara bersama informan, diantaranya :

Wawancara bersama Lurah Tenda yang ditanyakan mengenai sosialisasi program kelompok masyarakat (POKMAS) :

“Program kelompok masyarakat sejak awal dibentuk di kelurahan Tenda sudah pasti melibatkan masyarakat. Karena musyawarah terbentuknya pengurus POMAS ini melibatkan masyarakat secara bersam. Maka sudah pasti masyarakat sudah mengetahui program tersebut”.

Ketua POKMAS Kelurahan Tenda yang diwawancarai menjelaskan :

“Saya sebagai ketua POKMAS kelurahan Tenda terbentuk melalui musyawarah warga ketika itu di Kantor Desa. Masyarakat yang diundang hanya perwakilan beberapa masyarakat dari masing-masing lingkungan. Pommas ini adalah program ntuk bantuan masyarakat yang sejak awal telah disosialisasikan melalui media oleh pemerintah Kota Gorontalo. Secara

teknis kami di Kelurahan Sosialisasi awalnya melalui musyarah bersama warga saja”.

Sekretaris Kelurahan Tenda juga menyebutkan bahwa :

“Program POKMAS ini telah disosialisasikan melalui forum masyarakat di Kelurahan, kami tidak turun ke setiap lingkungan. Karena ketika sudah disampaikan oleh Camat kepala kami di Kelurahan, maka kami langsung membentuk pengurus POKMASnya melalui musyawarah di Kelurahan”.

Hal yang berbeda disampaikan oleh masyarakat ketika diwawancarai :

“POKMAS ini tidak jelas, tiba-tiba sudah dibentuk, dan tidak ada penyampaian pada kami. Saya ini masyarakat lingkungan lima, mereka pengurus POKMAS pernah datang untuk survey dan katanya ada program. Entah program apa yang mau dibangun. Maksud saya, coba mereka kalau ada program pembangunan, datang ke setiap lingkungan, kumpulkan masyarakat untuk menanyakan apa yang dibutuhkan untuk diprogramkan lewat POKMAS, bukan malah tiba-tiba sudah ada program tanpa masyarakat tau”.

Masyarakat lainnya ketika diwawancarai menjelaskan :

“Pengurus POKMAS pernah datang pada kami untuk menunjau saluran air, katanya survey untuk rencana perbaikan saluran air. Mereka datang saat sudah mau survey saja, perencanaan tidak ada masyarakat terlibat. Katanya hanya ketua RT dan perwakilan warga, tapi tidak diketahui warganya siapa, apa hasil musyawarahnya, itu tidak jelas”.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari informan tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan dalam hal sosialisasi program kelompok masyarakat (POKMAS) dalam perspektif pemerintah Kelurahan Tenda, program-program POMAS telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pertemuan bersama warga di kantor Kelurahan Tenda yang disertai dengan pembentukan pengurus POKMAS saat awal program pokmas direncanakan. Berbeda persepsi dengan pemerintah Kelurahan, masyarakat yang diwawancarai menjelaskan bahwa program-program tersebut tidak disosialisasikan secara baik kepada masyarakat. Keinginan akan pemahaman terhadap program POKMAS penting oleh masyarakat tidak terlihat dilakukan oleh pemerintah Kelurahan dan pengurus POMMAS Kelurahan Tenda. Hal ini Permasalahan sosialisasi adalah hal penting yang telah menjadi satu permasalahan POKMAS yang mendapat respon masyarakat.

4.2.2 Faktor Anggaran.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dalam kaitannya dengan faktor anggaran dalam mendukung pelaksanaan program kelompok masyarakat di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo.

Wawancara bersama Lurah Tenda Kota Gorontalo yang menjelaskan :

“Untuk anggaran program POKMAS ini telah disediakan oleh pemerintah Kota Gorontalo melalui APBD dengan ketentuan dari kami mengusulkan rencana program yang akan dilaksanakan. Jadi akan ada musyawarah yang akan merencanakan program-program apa saja yang akan dilaksanakan, setelah itu baru hasil usulan diteruskan ke Dinas terkait untuk diverifikasi dan disetujui anggarannya”.

Wawancara bersama sekretaris Kelurahan Tenda tentang anggaran :

“Anggaran ini bukan dari pihak kelurahan yang menyiapkan. Prosesnya ada, dimana masyarakat bersama anggota POKMAS melakukan musyawarah bersama untuk program apa yang mau dilakukan, abru diusulkan untuk dicairkan anggarannya. Tidak serta merta dari kami, prosedurnya ada. Selama ini ketika diusulkan Alhamdulillah dananya dicairkan sesuai dengan permintaan dan usulan”.

Ketua kelompok masyarakat yang bertanggung jawab akan pelaksanaan program kelompok masyarakat menejwlskan dalam wawancara :

“Jika ditanya soal anggaran, Alhamdulillah sampai dengan saat ini program POKMAS terealisasi sesuai usulan. Anggaran sebagai pembiayaan program juga sesuai dengan apa yang kami usulkan. Misanya untuk perbaikann saluran warga. Itu beberapa kali kami usulkan anggarannya sesuai yang keluar, jadi tidak ada masalah menurut saya”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama para inofrman sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program kelompok masyarakat yang ada di kelurahan tenda Kota Gorontalo selama ini telah berjalan berdasarkan usulan yang muncul dalam musyawarah bersama masyarakat, sehingga usulan tersebut yang ditindaklanjui untuk diverifikasi pada pihak terkait di pemerintah Daerah Kota Gorontalo ntuk dicairkan anggarannya. Tidak terdapat Permasalahan anggaran yang meninjol dalam pelaksanaan program dilapangan, karrena besaran anggaran yang keluar telah sesuai dengan yang diusulkan. Pada pelaksanaannyapun dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja program yang ada.

4.2.3 Aktor Pelaksana Program

Program kelompok masyarakat dalam perspektif implementasi kebijakan salah satu tinjauannya sebagaimana yang ada dalam fokus penelitian adalah aktor pelaksana kebijakan. Aktor pelaksana dalam program kelompok masyarakat berdasarkan hasil wawancara dapat disebutkan sebagai berikut :

Wawancara bersama Lurah Tenda Kota Gorontalo yang menjelaskan mengenai aktor pelaksana program di lapangan :

“Program POKMAS ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat. Untuk melaksanakan program-program yang dibiayai melalui dana POKMAS, maka dibentuklah pengurus POMAS di Kelurahan Tenda untuk mengkoordinir program-program masyarakat, serta bertanggung jawab langsung akan perencanaan dan pelaksanaan program. Mereka pengurus berjumlah lima orang yang kesemuanya adalah masyarakat Kelurahan Tenda, jadi mereka pengurus adalah juga sebagai aktor pelaksana program”.

Wawancara bersama ketua POKMAS Kelurahan Tenda, menjelaskan bahwa :

“POKMAS itu ada pengurusnya di Kelurahan, kami ini dibentuk berdasarkan musyawarah bersama masyarakat yang hadir saat itu. Jadi kalau ditanya aktor pelaksana, ya kami ini sebagai pelaksana dan penanggung jawab langsung program-program yang ada di POKMAS.”.

Lebih lanjut ketua POKMAS Kelurahan Tenda menambahkan bahwa :

“Nah kami berharap masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya, baik perencanaan, maupun pelaksanaan di lapangan. Kami ditingkat bawah hanya dibantu oleh para kepala lingkungan. Memang keterlibatan masyarakat secara keseluruhan itu belum ada, maka kedepan kami mengusulkan kepada Lurah untuk memfasilitasi kami dalam melibatkan masyarakat pada semua proses pelaksanaannya”.

Kepala urusan pembangunan Kelurahan Tenda menambahkan bahwa :

“Program ini ada peanggung jawabnya dan Lurah sebagai pembinannya. Sehingga untuk pelaksanaannya dilapangan telah dibentuk dan mereka bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan di atasnya. Mereka dibantu oleh beberapa masyarakat yang dari awal sudah terlibat dalam proses pembangunan lapangan”.

Masyarakat yang diwawancarai menjelaskan hal berbeda dalam kaitannya dengan aktor pelaksana program :

“Mereka itu tidak jelas sebagai penanggung jawab, masa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Yang datang itu hanya orang-orang itu saja, tidak ada ketambahan yang lain, misalnya dari masyarakat tidak ada ada kelihatan saat mereka turun lapangan, padahal itu kan program masyarakat”.

Kepala lingkungan lima ketika diwawancarai menjelaskan mengenai aktor pelaksanaan program POKMAS di Kelurahan Tenda :

“Kalau aktor pelaksana itu sudah ada, mereka itu sebagai penanggung jawab langsung program. Ada pengurusnya itu. Masyarakat memang pernah mengeluhkan kesaya akan keterlibatan mereka, kenapa tidak ada masyarakat yang terlibat. Saya sebagai kepala lingkungan hanya menjalankan saja petunjuk dari Lurah pada saat program dilaksanakan,. Tidak ada kewenangan saya dalam menentukan orang-orang yang terlibat”.

Dari beberapa penjelasan informan mengenai keterlibatan aktor pelaksana dalam program POKMAS di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa program POKMAS telah ada aktor pelaksanaannya yaitu pengurus POKMAS yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.

Aktor pelaksana program terdiri dari beberapa orang yang juga sebagai warga masyarakat kelurahan Tenda. Keterlibatan masyarakat sebagai aktor pelaksana dinilai masih kurang maksimal. Adanya keluhan masyarakat terhadap keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan menjadi penilaian pentingnya masyarakat dilibatkan secara maksimal sehingga dapat menggambarkan tujuan program yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

4.3 Pembahasan

Kebijakan publik adalah satu konsep yang memberikan arah perbaikan pada kepentingan publik melalui rumusan dan pelaksanaan satu keputusan dengan tujuan untuk mengatur urusan publik, serta dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Secara konsep kebijakan publik terbagi pada empat dimensi pokok yang merupakan variabel dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah : pertama : komunikasi, yang mencakup kesepahaman akan program yang akan dilaksanakan, sosialisasi program, serta bentuk lain dari penyampaian informasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Kedua: Sumber daya yang mencakup ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Ketiga : Disposisi yang menyangkut komitmen, serta konsistensi aktor pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan dan keempat adalah : struktur birokrasi yang menyangkut adanya aktor pelaksana yang secara struktural mendukung pelaksanaan program dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah.

Edward III dalam (Nugroho, 2012) telah membagi keempat variabel tersebut untuk memberikan kemudahan bagi para pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti telah memberikan gambaran bagaimana kedudukan variabel implementasi secara langsung memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan lapangan ketika hal tersebut diperhatikan secara baik oleh pemerintah Kelurahan Tenda. Tiga variabel yang dikaji dan dianalisis lapangan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program POKMAS di Kelurahan Tenda belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sosialisasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan menjadi bagian penting yang dinilai sebagai permasalahan.

Sosialisasi dan ketersediaan aktor yang melibatkan masyarakat tidak boleh dikesampingkan oleh penanggung jawab program POKMAS di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo. Dua indikator tersebut menurut Nugro (2012) adalah variabel yang juga menjadi penentu kebijakan itu terlaksana atau tidak. Dukungan masyarakat akan pelaksanaan program menjadi mutlak untuk diberikan dan diperhatikan oleh pemerintah, karena di era desentralisasi sekarang ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton bagi pembangunan, akan tetapi juga sebagai perumus dan pelaksana langsung. Uraian amanah dalam undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014. Pada proses pembangunan masyarakat menjadi aktor pelaksana secara langsung, apalagi program yang ada di Kelurahan Tenda tersebut adalah programnya masyarakat yang semuanya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat.

Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari factor penentu dari ukuran konsep kebijakan publik. Edward III (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa tanpa sebuah implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak ada ujungnya, sehingga penilaian public akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerkan untuk saling bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konkrit pemerintah pusat sampai ketingkat pemerintahan dibawahnya. Namun keterlibatan masyarakat tidaklah cukup, pemahaman yang diberikan dalam bentuk sosialisasi juga penting diintensifkan guna memberikan persepsi yang sama antara pemerintah dan juga masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implemetsi program POKMAS di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang telah menggambarkan keadaan dalam proses pelaksanaan kebijakan dengan ukuran variabel implmenetasi kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Indikator focus baik, sosialisasi, anggaran dan aktor pelaksana ketiganya berjalan pada pelaksanaan program POKMAS. Terdapat beebraapa catatan sebagai permasalahan dilapangan yang dapat menghambat implementasi sesuai dengan tujuannya, yaitu pemahaman terkait program kemasyarakatan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasar pada hasil penelitian dan kesimpulan yang ada pada sub bab sebelunya, maka sebagai saran, pemerintah Kelurahan Tenda dalam konteks memberikan sosialisais harus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi yang luas pada masyarakat yang ada di kelurahan Tenda. Media komunikasi melalui rukun warga harus diintensifkan semaksimal mungkin, misalnya melalui rembuk warga pada tingkat lingkungan, pertemuan masyarakat pada kantor Kelurahan, serta upaya lainnya yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan program. Tidak hanya disitum masyarakat juga perlu dilibatkan secara penuh, karena pada hakekatnya

program-program yang dilaksanakan adalah langsung dirasakan pada kehidupan masyarakat Kelurahan Tenda. Transparansi pada setiap program yang dilaksanakan juga menjadi penting untuk selalu dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontgalangi Kota Gorontalo.



“Wawancara dengan staf kantor kelurahan tenda mengenai POKMAS”

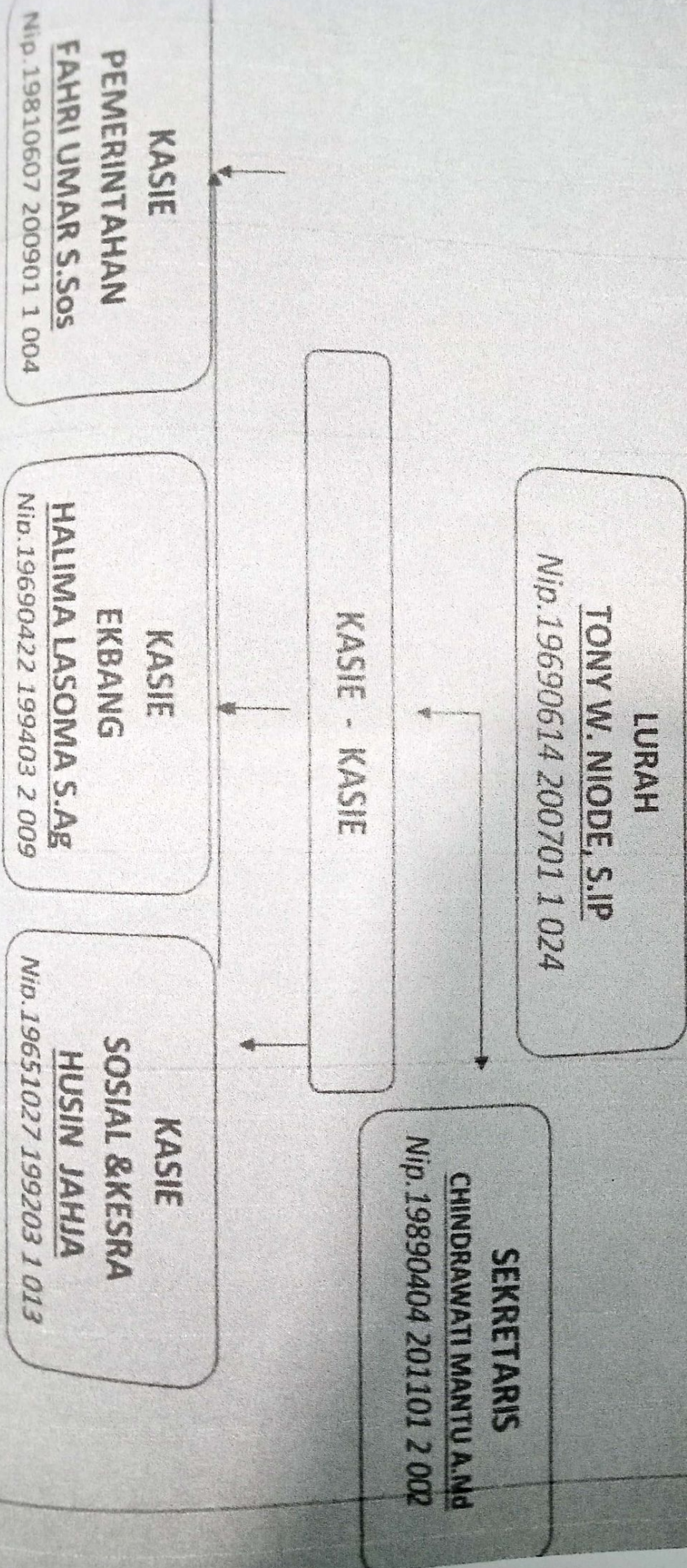


“Wawancara dengan ibu sekretaris kantor kelurahan tenda tentang penerapan POKMAS di kelurahan Tenda “



“ Suasana di kantor kelurahan Tenda ”

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KELURAHAN TENDA KECAMATANHULONTALANGI
TAHUN 2021**



PAPER NAME

SKRIPSI_S2118034_SITI HADIDJAH ABD
ULLAH_IMPLEMENTASI PROGRAM KEL
OMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KE
LURAH

AUTHOR

S2118034 SITI HADIDJAH ABDULLAH

WORD COUNT

7291 Words

CHARACTER COUNT

51087 Characters

PAGE COUNT

48 Pages

FILE SIZE

111.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 10, 2022 10:19 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 10, 2022 10:21 PM GMT+8

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

20% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com	Internet	7%
2	core.ac.uk	Internet	5%
3	repository.ub.ac.id	Internet	4%
4	scribd.com	Internet	2%
5	digilib.uin-suka.ac.id	Internet	<1%
6	repository.fisip-untirta.ac.id	Internet	<1%
7	neliti.com	Internet	<1%
8	id.scribd.com	Internet	<1%



xerma.blogspot.com

Internet

<1%



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 111/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : SITI HADIDJAH ABDULLAH
NIM : S2118034
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Program Kelompok Masyarakat
(Pokmas) Di Kelurahan Tenda Kecamatan
Hulonthalangi Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **20%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Gorontalo, 06 Juni 2022

Tim Verifikasi,



Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3856/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Lurah Tenda

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Hadidjah Abdullah

NIM : S2118034

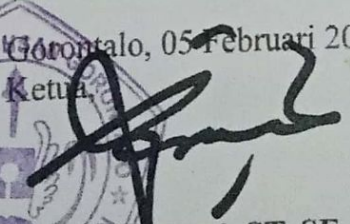
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULONTALANGI
KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) DI KELURAHAN TENDA KECAMATAN
HULONTALANGI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Februari 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KECAMATAN HULONTHALANGI
KELURAHAN TENDA

JALAN. YOS SUDARSO NO.120 TELP.(0435) 824870

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 474.1/PEM/KT/570

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHINDRAWATY MANTU, A.Md**

Jabatan : **SEKERTARIS**

Menerangkan kepada

a. Nama : **SITI KHADIJAH ABDULLAH**

b. NIM : **S2118034**

c. Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik**

d. Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Sesuai dengan permohonan izin Penelitian dengan Nomor : 3856/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022 yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan di pergunakan Syarat untuk ujian Skripsi.

Gorontalo, 23 Mei 2022

An. **LURAH TENDA**

CHINDRAWATY MANTU, A.Md

NIP. 19890404 201101 2 001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Hadidjah Abdullah
NIM : S2118034
Tempat /Tgl Lahir : Gorontalo, 15 Maret 2000
Nama Ayah : Iwan Abdullah
Nama Ibu : Wisna Tahir
Alamat : Jln Brawijaya Kel. Tenda
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1
Judul Skripsi : Implementasi Program Kelompok Masyarakat (POKMAS) di
Kelurahan Tenda Kecamatan Hulondhalangi Kota Gorontalo



SEKOLAH	MASUK/LULUS
SDN 44 KOTA GORONTALO	2009-2014
SMP NEGERI 5 GORONTALO	2014-2016
SMA NEGERI 1 GORONTALO	2016-2018
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	2018-2022